
Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Prespektif Hadis

Ibya Zaynah¹ Muhammad Alif²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Email : ibiazaynah9@gmail.com¹

Abstract. *The principles of democracy in the Hadith perspective reflect Islamic beliefs that emphasize the values of equality, deliberation, and justice. Although the word “democracy” is not found in the hadith texts, the teachings on the basic principles of democracy contain and underlie people's participation, freedom of speech, and respect for the rights of each individual that can be found in the teachings of the prophet Muhammad SAW. Hadiths related to deliberation (shura), social justice, and leader selection indicate that decision-making in society should be based on inclusiveness, transparency, and responsibility. For example, hadith-reports that suggest deliberation in dealing with important issues indicate respect for individual voices and opinions in a collective decision. In addition, the concept of justice in the hadith emphasizes the importance of equal treatment of all members of society without discrimination. The purpose of this article is to provide knowledge about democracy in the Hadith perspective in the perspective of hadith. Thus, the hadith perspective provides a moral and ethical foundation for the implementation of democratic principles that are oriented towards the welfare of the people and the fair management of public interests.*

Keywords : Democracy, Hadith, Principles of Democracy

Abstrak. Prinsip-prinsip demokrasi dalam prespektif hadis yang mencerminkan dengan keyakinan Islam yang menekankan kepada nilai-nilai kesetaraan, musyawarah, dan keadilan. Meskipun kata “demokrasi” tidak ditemukan dalam teks hadis tetapi ajaran pada prinsip-prinsip dasar demokrasi mengandung dan mendasari partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan penghormatan hak-hak setiap individu yang dapat ditemukan dalam ajaran nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang berkaitan dengan musyawarah (syura), keadilan sosial, dan pemilihan pemimpin yang dapat meniadakan bahwasannya pengambilan keputusan dalam masyarakat harus berdasarkan inklusivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Misalnya, hadis yang menyarankan untuk bermusyawarah dalam menghadapi masalah penting menunjukkan adanya penghargaan terhadap suara dan pendapat individu dalam suatu keputusan kolektif. Selain itu, konsep keadilan dalam hadis menegaskan pentingnya perlakuan setara terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Tujuan pada artikel ini, untuk memberikan pengetahuan tentang demokrasi dalam prespektif hadis. Dengan demikian, perspektif hadis memberikan landasan moral dan etis bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan pengelolaan kepentingan publik secara adil.

Kata kunci : Demokrasi, Hadis, Prinsip-prinsip Demokrasi

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern telah menjadi landasan utama dalam tatanan politik global, menawarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Di dunia barat, demokrasi menjadi acuan negara dan gagasan, bahwasannya demokrasi sebagai pilar negara. Dalam praktiknya, demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang menghormati hak setiap individu untuk berpartisipasi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi mempunyai pengetahuan yang dimana kekuatan berasal dari rakyat untuk rakyat, yang menjunjung tinggi dan membela hak-hak mereka. Demokrasi mempunyai istilah yaitu “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), jadi demokrasi merupakan kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Mengutip dari artikel yang disusun oleh Ali Mutakin, menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menjelaskan

bahwasannya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mempertanggung jawaban atas tindakan yang mereka lakukan di ranah masyarakat.

Demokrasi mempunyai sebuah makna, yaitu: demokrasi mengacu pada pemerintahan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam aspek kehidupan. Beberapa pengertian tentang demokrasi menurut para ahli yang mengutip dari buku “Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia” yang disusun oleh Hyronimus Rowa. Dari buku tersebut ada pendapat yang menjelaskan makna yang tersirat di dalam demokrasi, Pertama. Menurut Juan Linz, di dalam pendapatnya menjelaskan bahwa demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara baik, yang dimana para pemimpin dilakukan pemilihan secara teratur. Kedua, Schumpeter memberikan definisi singkat tentang makna demokrasi menurutnya yaitu, demokrasi merupakan mekanisme bagi pemilihan dan memberikan suatu kekuasaan kepada pemerintah yang mengandung kompetisi dalam dunia politik. Pada demokrasi modern “dari rakyat untuk rakyat”, menurut Abraham Lincoln yang disebutkan pada pidatonya tahun 1863 yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokratis, kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan mereka berhak untuk mengganti sebuah pemerintahan yang sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

Di dalam normatif Islam, Islam mendorong untuk melakukan *ma'ruf nahi munkar* bagi semua individu, masyarakat, bahkan pemerintahan. *Ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip dalam Islam untuk kebaikan dan menjauhkan keburukan. Oleh karena itu manfaat pada prinsip Islam dalam demokrasi untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut M. Hussein Haikal, seorang politik Islam dari Mesir, mengutip dari artikel Muhemin yang menjelaskan bahwa prinsip demokrasi dengan Islam mempunyai kesamaan yang saling berdampingan. Salah satu yang di kutip yaitu prinsip *ijtihad* yang dimana dalam prinsip tersebut mencakup kewewenangan dalam pengawasan penguasa, kebebasan dalam berpikir, dan berakuntabilitas. Selanjutnya menurut Seikh Yusuf al-Qardhawy cendekiawan Mesir, bahwasannya demokrasi dengan Islam mempunyai kesamaan oleh karena itu ia mengatakan jika seorang muslim tidak memahaminya maka mereka kurang memahami hakikat Islam. Selanjutnya dari pendapat Abdurrahman Wahid tokoh *pluralisme* dan demokrasi Indonesia, menjelaskan hukum mempunyai kunci utama yaitu agama karena terdapat adanya kesetaraan dan keadilan serta dipertegas oleh Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pada prinsip demokrasi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Al-Qur'an di atas menjelaskan Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan dari segi suku, kekayaan, bahkan keturunan sekalipun. Dan di dalam hadis Tirmidzi 2303

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَفِي الْبَابِ

Pada hadis menjelaskan untuk kita menyanyangi sesama, jika kita tidak menyanyangi sesama maka Allah Swt tidak menyanyangi kita. Dari penjelasan Al-Quran dan hadis memberikan panduan etis yang membentuk perilaku individu dan masyarakat,

Namun kenyataannya demokrasi dengan Islam merupakan topik kontroversi tersendiri karena perbedaan pandangan demokrasi dunia barat dan Islam yang mengenai kompatibilitas prinsip-prinsip demokrasi modern dengan konsep Islam, terutama terkait otoritas hukum dan kedaulatan. Seperti menurut Abu al-A'la al-Maududi pendiri Jamaat-e-Islami mengatakan bahwa demokrasi berbeda dengan Islam karena di dalam kepemimpinan barat mencapai multilateralisme dan pada kepemimpinan negara demokrasi menikmati hasil hak kedaulatannya sedangkan di dalam Islam, kepemimpinan atau ke-khalifahan dibatasi oleh batas-batas naungan hukum ilahi. Selanjutnya Hizbut Tahrir di pimpin oleh Taqiy al-Din al-Nabhani menyatakan bahwa prinsip pada demokrasi bertentangan dengan prinsip *wakalah* dan mereka memandang bahwa itu termasuk kebatilan. Contohnya pada kelompok HTI *Hizbut Tahrir Indonesia* yang mendeklarasikan bahwa demokrasi dengan Islam mempunyai perbedaan yang signifikan terutama pada kepemimpinan, karena HTI memperjuangkan *Khalifah Islamiyah*. Oleh karena itu pemerintahan membubarkan kelompok HTI dikarenakan takut adanya perpecahan pada masyarakat. Selain itu, Masih diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hadis-hadis tertentu mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Penelitian ini juga belum mengungkap secara rinci bagaimana pendekatan tematik terhadap hadis dapat membantu memahami demokrasi dalam perspektif Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif hadis melalui pendekatan tematik. Kajian ini akan mengevaluasi nilai-nilai demokrasi yang diuraikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengidentifikasi relevansinya dalam konteks demokrasi modern. Dengan menggunakan metode analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman antara Islam dan demokrasi dalam ranah sosial-politik. Penelitian ini juga berupaya memberikan wawasan baru tentang bagaimana

hadis dapat berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan inklusif. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan konseptual untuk memperkuat narasi Islam yang mendukung demokrasi di era kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep Demokrasi, dengan sumber data primer berupa kitab-kitab hadis dari mushadir ashliyah digital dari Maktabah Syamilah, dan Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Dan sumber sekunder berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan demokrasi. Dengan teknik pengumpulan data *Library reseach* (Penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan hadis tematik kontemporer dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema dibahas dan metode *Grounded Theory* dengan menganalisis data yang terus-menerus, selama data di lapangan masih tetap dikumpulkan. Selanjutnya proses *open coding* yang merupakan bagian dari analisis data, dimana peneliti melakukan identifikasi, penamaan, kategorisasi dan penguraian hadis-hadis yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan keterkaitannya dengan konsep parenting belajar. Berikutnya adalah *axial coding*. Tahap ini, adalah menghubungkan berbagai kategori penelitian dalam bentuk susunan property (sifat-sifat) yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode, dan merupakan kombinasi cara berfikir induktif dan deduktif. Tahap selanjutnya adalah, *selective coding*, yakni memilih kategorisasi inti, dan menghubungkan kategori-kategori lain pada kategori inti. Selama proses coding ini, diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil, Pembahasan, dan Analisis

Tabel 1. Tema-tema Hadis

EBOOK PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI	
A.	Kepemimpinan Dalam Demokrasi (Muslim 1855)
	Kriteria Kepemimpinan :
1.	Adil Dalam Kepemimpinan Pada Prinsip Demokrasi (Shahih Abu Dawud 3575)
	Adil Dalam Masyarakat (Shahih Ibnu Hibban 101)
	Adil dalam Menegakkan Hukum (Musnad Syafi'I 445 dan Musnad Ahmad 286)
	Adil dalam Keputusan (Shahih abu dawud 3575)
2.	Amanah Dalam Kepemimpinan Pada Prinsip Demokrasi (Shahih Muslim 1820)
	Amanah dalam Melayani Masyarakat (Shahih Muslim 203)
3.	Jujur Dalam Kepemimpinan Pada Prinsip Demokrasi (Musnad Muslim 143)
4.	Tanggung Jawab Dalam Kepemimpinan Pada Prinsip Demokrasi (Shahih Bukhari 893)
B.	Partisipasi Rakyat Pada Prinsip Demokrasi
1.	Musyawarah (Musnad Ahmad 176)
2.	Mufakat (Sunan Darimi 163)
3.	Ketaatan Rakyat pada Pemimpin (Al- Mustadrak 19)
C.	Kesetaraan Pada Prinsip Demokrasi (Sunan Tirmidzi 2381)
1.	Kesetaraan pada Status Sosial (Sunan Tirmidzi 2305)
2.	Kesetaraan pada Hukum (Sunan Darimi 2200)
3.	Kesetaraan pada Gender (Muwatha' malik 1315)
4.	Kesetaraan pada Setiap Kelompok (Kaum) (Shahih Ibnu Hibban 137 dan Musnad Ahmad 19541)
D.	Kebebasan Pada Prinsip Demokrasi
1.	Kebebasan dalam Memilih Pemimpin (Musnad Ahmad 21354)
2.	Kebebasan dari Diskriminasi (Al- Mustadrak 133)

Hasil dari penelitian ini merupakan bagian dari metode yang berfokus pada hadis-hadis yang relevan Pencapaian hadis yang sesuai dengan inklusi demokrasi, maka ditetapkan hadis yang relevan dengan proses *Grounded Theory* melalui *open coding*, *axial coding*, *selective coding* yang telah dikategorisasikan menjadi 4 sub/kategori dan memperoleh 20 hadis dengan kata kunci “musyawarah, adil, tanggung jawab, kesetaraan, dan kebebasan”. Dengan demikian, pada fenomena prinsip demokrasi sebagai sensitizing concept. Oleh karena itu, E-book dapat dilihat di DOI berikut: DOI 10.17605/OSF.IO/8ZGFN dan oleh data dapat dilihat di DOI berikut: DOI 10.17605/OSF.IO/TA5HX.

Berdasarkan tabel 1: hasil dari pencapaian hadis melalui artikel serta beberapa web hadis dengan menggunakan metode *Grounded Theory*.

1. Kepemimpinan

- خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ سَحِبَ وَنَهَمَ وَيُجِبُ وَنَكُمُ

sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya (Muslim 1855)

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, oleh karena itu pemimpin juga mempunyai peran penting dalam sebuah kepemimpinan demokrasi. Pada kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri beberapa fungsi yang saling berhubungan dan berkerja sama serta mempengaruhi satu sama. Tidak hanya itu pada kepemimpinan, kepemimpinan mempunyai teori yang dikemukakan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki daya tarik dengan kualitas yang luas dan membuat para pengikutnya patuh, termotivasi, dan terinspirasi olehnya. Mengutip dari artikel yang disusun oleh Roni Harsoyo, Menurut Teori Kepemimpinan Transformasional yang diterangkan oleh Bass menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik yaitu dengan adanya kontribusi oleh rakyat untuk mengikuti visi/ misi atau tujuan yang telah pemimpin terapkan. Dengan hal itu, pemimpin mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yaitu;

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya”
(Muslim 1855)

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa baik pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mencintai rakyatnya dengan memperhatikan kebutuhan rakyat, memiliki hubungan baik

dengan rakyat dan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Karena pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya merupakan hasil dari demokrasi yang bersih dan sehat.

Dengan pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya maka pemimpin harus memiliki karakteristik yang akan menimbulkan hasil yang baik untuk kelangsungan demokrasi sehat dan bersih yang masyarakat inginkan, seperti adil, amanah, jujur, dan tanggung jawab. Berikut merupakan penjelasan beberapa karakteristik kepemimpinan.

A. Adil

- وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ

Barangsiapa yang kedzalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka (Sunan Abu Daud 3575)

a. Adil dalam Masyarakat

- بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اْعْدِلْ

Pada saat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan harta rampasan perang di Ji*ranah, ada seseorang berkata, "Berlakulah secara adil." (Shahih Ibnu Hibban 101)

b. Adil dalam Menegakkan Hukum

- مَلِكٌ قَادِرٌ

Raja yang adil (Musnad Syafi'i 445)

- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْصُّ مِنْ نَفْسِهِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukan qishas kepada dirinya (Musnad Ahmad 286)

Kepemimpinan yang baik merupakan hasil dari demokrasi yang baik juga. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar yang dimana sudah di terangkan dalam hadis jika seorang pemimpin tidak adil maka neraka akan menantinya. sama hal nya dengan penjelasan hadis Sunan Abu Daud 3575, bahwa kepemimpinan mempunyai tanggung jawab besar yang dimana sudah di terangkan dalam hadis tersebut, jika seorang pemimpin tidak akan masuk surga ketika pemimpin yang tidak adil. Adil merupakan arti dari keseimbangan, keserdahanaan, dan kesejahteraan yang terdapat pada prinsip adil yaitu *nasib* dan *qitsh*, *qisthas* dan *mizan*, dan *taqwim*. Oleh karena itu, adil ialah tidak memihak, berpihak pada suatu kebenaran, dan tidak melakukan sewenang-wenangan yang dapat merugikan. Adil memiliki beberapa macam seperti; adil dalam masyarakat, adil dalam hukum, bahkan keputusan juga termasuk dalam macam-macam adil, yang dimana itu menggambarkan pemimpin yang baik dalam sebuah kepemimpinan untuk kelangsungan demokrasi yang baik.

Adil juga memberikan suatu perlakuan atau perbuatan yang menyetarakan sesama, mengambil keputusan dengan tepat, dan pemimpin tidak memihak serta mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam Teori Situasional Leadership yang dikemukakan oleh Hersey and Blanchard, menyatakan bahwa pemimpin yang baik dan efektif memahami dinamika situasi dan menyesuaikan dinamika pada kemampuannya yang sesuai situasi yang ada serta menekan pemimpin bersikap fleksibel dan adil. Dalam Islam, adil merupakan sesuatu perbuatan terpuji, terutama pada seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin merupakan penguasa dalam suatu kepemimpinan, oleh karena itu, hadis Nabi yang menerangkan pemimpin yang adil yaitu;

“Barangsiapa yang kedzalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka (Sunan Abu Daud 3575)”. Dari hadis ini, menjelaskan bahwa seorang pemimpin diminta untuk tidak mendzalimin rakyat dan pemimpin diminta untuk berlaku adil, karena hadis ini juga menggambarkan jika seorang pemimpin tidak berlaku adil kepada rakyatnya maka api neraka merupakan tempatnya. *“Pada saat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan harta rampasan perang di Ji'ranah, ada seseorang berkata, “Berlakulah secara adil”*. (Shahih Ibnu Hibban 101). Dari hadis ini telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya pemimpin dalam kepemimpinan mempunyai sifat adil dalam memberikan hak kepada yang lebih berhak yaitu rakyat, karena seorang pemimpin juga mengatur pembagian hak-hak secara adil yang dimiliki oleh rakyat. *“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukan qishas kepada dirinya”* (Musnad Ahmad 286).

Dari hadis ini, menjelaskan melakukan adil dalam hukum bukan hanya untuk rakyat saja tetapi sebagai pemimpin juga harus adil pada dirinya sendiri. Sama hal dengan yang digambarkan pada hadis di atas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin menghukum dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Dengan demikian, adil merupakan suatu karakteristik dalam diri seorang pemimpin untuk membangun demokrasi yang diinginkan masyarakat.

Amanah

- وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خَزَائِنٌ وَنَدَامَةٌ. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar (Muslim 1820)

a. Amanah dalam Melayani Masyarakat

- يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya (Shahih Muslim 203)

Amanah merupakan sebuah sifat pemimpin yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, hadis Muslim 1820 “ *Wainnahā amānatu. Wainnahā yaumalqiyāmati, khizyun wa nadāmatun, illā man akhazahā biḥaqqihā waadilladzi ‘alāihi fihā*” , hadis tersebut memberikan penerangan pada pemimpin untuk melaksanakan amanah untuk melaksanakan pekerjaannya dan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakatnya.

Pada amanah memang diperlukan dalam pemimpin kepada masyarakat, agar masyarakat selalu memberikan dorongan atau semangat kepada pemimpinnya. Dalam teori kepemimpinan, Teori Kepemimpinan Etis (*Ethical Leadership Theory*), teori ini yang menurut Brown dan Trevino adalah pemimpin yang bertindak amanah karena pada terori ini menjunjung tinggi nilai moral dan integritas dalam diri pemimpin. Dan pada Teori Kepemimpinan Servant Leadership, teori yang menurut Robert K bahwa pemimpin harus mempunyai hubungan positif, mereka melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif teori kepemimpinan modern serta ajaran Islam, amanah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dan legitimasi seorang pemimpin. Pada hadis yang telah diterangkan yaitu; “*jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar*” (Muslim 1820). Dari hadis ini, menjelaskan kepemimpinan yang di miliki oleh seorang pemimpin merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan dikerjakan, karena hadis itu juga memberitahukan kepada pemimpin untuk melaksanakan amanah dalam tugas-tugasnya yang telah diberikan kepadanya. “*Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya*” (Shahih Muslim 203)

Dari hadis diatas, memberitahukan kepada seorang pemimpin bahwa adanya ganjaran yang akan menimpa dirinya jika pemimpin tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan membohongi rakyatnya. Oleh karena itu, sifat amanah dalam diri pemimpin untuk menghasilkan demokrasi yang sehat dan dapat di cintai oleh rakyatnya.

Jujur

- وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

Bersaksi palsu atau berkata dusta (Shahih Muslim 143)

Kepemimpinan pada demokrasi merupakan kekuasaan pemimpin yang sangat penting. Oleh karena itu, pemimpin harus di hormati serta membuat pemimpin dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi seorang pemimpin harus jujur dalam apapun agar membangun kepercayaan pada masyarakat. Sama hal nya dengan hadis Shahih Muslim 143 “*Wa syahādatuz-zūri au qauluz-zūri*”. Dalam Teori Kepemimpinan Otentik (*Authentic Leadership Theory*), teori ini menrangkan dan menekankan pemimpin dalam suatu kepemimpinan adalah mereka yang jujur, memiliki nilai-nilai moral, dan melakukan tindakan sesuai dengan prinsipnya. Dalam Islam kejujuran sangat diperlukan dalam seorang pemimpin karena itu merupakan kunci utama pada kepemimpinan, dari hadis Nabi yaitu; “*Bersaksi palsu atau berkata dusta*” (Shahih Muslim 143). Dari hadis tersebut, menerangkan keterangan tentang balasan yang Allah berikan kepada pemimpin pada kepemimpinannya, yaitu bersaksi palsu atau berkata dusta. Dengan demikian pemimpin yang jujur sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dan membuat teguhnya pilar demokrasi.

Tanggung Jawab

- **وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**

Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban dari yang dipimpinnya (Shahih Bukhari 893)

Tanggung jawab merupakan hasil akhir dari sebuah pemimpin, karena tanggung jawab memegang semua apa yang ada dalam kepemimpinan dari adil, amanah, dan jujur. Tanggung jawab merupakan sebuah tindakan seorang pemimpin yang dibebankan tugas-tugas untuk kelangsungan masyarakat. Dalam Teori Situasional yang dikemukakan oleh Hersey dan Kenneth Blanchard, bahwa teori itu menjelaskan seorang pemimpin harus menyesuaikan dirinya untuk mencakup kemampuan, kemauan, dan tanggung jawab agar dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan.

Dalam Islam, tanggung jawab merupakan tugas penting yang dilakukan pada seorang pemimpin dan harus dijaga dan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, pada hadis Nabi yaitu; “*Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban dari yang dipimpinnya*”(Shahih Bukhari 893). Dari hadis tersebut, jelas bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan adil dan penuh amanah.

Pada demokrasi pemimpin dalam kepemimpinannya sangat dihormati dan dihargai, meskipun demokrasi memiliki arti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu,

pemimpin mempunyai tanggung jawab besar untuk kesejahteraan rakyat dan mempertahankan demokrasi agar tetap baik.

Partisipasi Rakyat

A. Musyawarah

- شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ

dimusyawarahkan diantara enam orang (Musnad Ahmad 176)

B. Mufakat

- فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ

jika telah sepakat (pendapat mereka) maka dengan dasar keputusan bulat tersebut ia memberikan keputusan hukum (Sunan Darimi 163)

C. Ketaatan Rakyat pada Pemimpin

- وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ

Dan taatilah pemimpin kalian (Al-mustadrak 19)

Rakyat merupakan tingkatan paling tinggi, dikarenakan kehendak rakyat menjadi dasar dari hukum otoritas pemerintahan. Seperti musyawarah, musyawarah merupakan interaksi dan partisipasi yang menunjukkan adanya arahan yang dapat mengakibatkan perdebatan ataupun perselisihan. Islam mengajarkan musyawarah, salah satu ajaran melalui hadis yaitu “*Syūrā bayna haulāis-sittati*” (Musnad Ahmad 176). Tidak hanya itu saja, setelah adanya musyawarah masyarakat juga akan melaksanakan sebuah mufakat. Mufakat adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dengan berbagai pendapat dan kepentingan, mufakat mengurangi potensi perselisihan. Oleh karena itu, rakyat menjadi tingkatan paling tinggi pada demokrasi akan tetapi sebagai rakyat juga harus mentaati pemimpin, karena tidak dapat dipungkiri pemimpin merupakan kunci dari negara.

Pada Teori Demokrasi Partisipatif (*Theory Of Participatory Democracy*), teori ini membangun rakyat untuk peran aktif pada proses kebijakan dalam pemerintahan untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan hadis pada demokrasi tentang partisipasi rakyat. Yaitu; “*dimusyawarahkan diantara enam orang*” (Musnad Ahmad 176) dan “*jika telah sepakat (pendapat mereka) maka dengan dasar keputusan bulat tersebut ia memberikan keputusan hukum*” (Sunan Darimi 163) Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa setiap sesuatu untuk menentukan keputusan maka diharuskannya bermusyawarah dan bermufakat. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keterlibatan rakyat dalam kepemimpinan. Dan yang dilakukan oleh rakyat untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat dengan cara mematuhi dan mentaati

pemimpin, yang telah diberitahukan pada hadis yaitu; “*Dan taatilah pemimpin kalian*” (Al-mustadrak 19).

Oleh karena itu, partisipasi rakyat sangat di butuhkan untuk kepentingan demokrasi, karena sesuai dengan arti demokrasi yang sebenarnya, yaitu; kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kesetaraan

A. Kesetaraan

- مَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

Barangsiapa tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayanginya (Sunan Tirmidzi 2381)

B. Kesetaraan pada Status Sosial

- وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri niscaya kau menjadi orang muslim (Sunan Tirmidzi 2305)

C. Kesetaraan pada Hukum

- وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya (Sunan Darimi 2200)

D. Kesetaraan pada Gender

- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangannya (Muwatha' Malik 1315)

E. Kesetaraan pada Setiap Kelompok (Kaum)

- نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ

Ya, karena mereka termasuk bagian dari mereka Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh mereka (anak- anak kaum musyrik) pada peristiwa Hunain (Shahih Ibnu Hibban 137)

- إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجَمُوا

Sesungguhnya urusan ini akan senantiasa di tangan orang-orang Quraisy selama sikap mereka (Musnad Ahmad 19541)

Kesetaraan merupakan prinsip yang ada di demokrasi, karena kesetaraan ini membuat setiap hak individu ataupun kelompok tidak memiliki rasa diskriminasi. Pada kehidupan sosial terutama pada masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan kesetaraan agar tidak adanya

kesenjangan untuk masyarakat. Dalam kesetaraan sendiri bukan untuk memberikan hal yang sama tanpa adanya pertimbangan bahkan kesetaraan berguna untuk melihat potensi bagi individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, pada kesetaraan harus memiliki sikap saling menyayangi satu sama lain, seperti di jelaskan pada hadis Tirmidzi 2381 berbunyi “*Man yurā'iyllāhu bihi*. Kesetaraan mempunyai beberapa macam, kesetaraan sosial, gender, hukum, bahkan kesetaraan pada kelompok. Kesetaraan sosial merupakan sebuah kondisi individu yang tinggal didalam masyarakat yang memiliki hak dan perlakuan tanpa diskriminatif, berupa perbedaan status sosial, ekonomi, latar belakang, ras, agama, dll.

Dalam Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*) yang dikemukakan oleh John Rawls, menyatakan bahwa kepemimpinan harus memiliki dasar prinsip keadilan dan kestaraan, setiap rakyat berhak mempunyai nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kesetaraan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kepemimpinan yang mencerminkan keadilan dan inklusivitas dalam mengelola masyarakat atau organisasi. Dalam berbagai perspektif, baik dalam teori kepemimpinan modern maupun ajaran agama seperti Islam, kesetaraan menjadi dasar bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil tanpa diskriminasi. Seperti hadis berikut, yaitu;

Barangsiapa tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayanginya (Sunan Tirmidzi 2381), *cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri niscaya kau menjadi orang muslim* (Sunan Tirmidzi 2305). Dari 2 hadis berikut, menjelaskan bahwa cara untuk memperoleh kesetaraan, maka dilakukannya untuk mencintai dan menghargai diri sendiri, karena hadis tersebut juga memberitahukan jikalau tidak menyayangi orang lain seperti tidak menyayangi dirinya sendiri maka Allah SWT tidak akan menyayangi. *Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya* (Sunan Darimi 2200). Hadis tersebut menerangkan kesetaraan pada hukum, yang dimana keterangan dari sahabat Nabi untuk menghukum anak tercintanya Nabi Muhammad SAW jika melakukan kesalahan. Karena kesetaraan hukum tidak memandang siapa yang akan mendapatkan hukuman, jika melakukan kesalahan. *Seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangannya* (Muwatha' Malik 1315).

Dengan demikian kesetaraan merupakan faktor terpenting dalam demokrasi. Pada Islam, mengajarkan dan memberitahukan contoh tentang bagaimana kita dapat menyetarakan sesama tanpa adanya perselisihan. Kesimpulannya adalah Islam dan demokrasi memiliki keterlibatan untuk kepentingan bersama dan mensejahterakan sesama.

Kebebasan

A. Kebebasan dalam Memilih Pemimpin

- اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ

Tetaplah kalian membela Quraisy selama mereka menegakkan keadilan untuk kalian (Musnad Ahmad 21354)

B. Kebebasan dari Diskriminasi

- مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بَغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Barangsiapa membunuh jiwa mu'ahidah (orang yang telah melakukan perjanjian dengan umat Islam, sehingga jiwa dan agama serta kehormatannya aman) tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium bau surga (Al Mustadrak 133)

Demokrasi menjunjung tinggi pada kebebasan rakyat seperti; kebebasan beragama, pendapat, bahkan politik. Dalam kebebasan demokrasi merupakan sebuah tanggung jawab antara individu dengan masyarakat, agar menjaga keseimbangan suatu negara. Kebebasan juga menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan, menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan memastikan kedamaian pada masyarakat dengan setiap suara dihargai dan didengar. Sama hal dengan kebebasan dalam hadis Nabi SAW yaitu Musnad Ahmad 21354 “*Istaqîmû liquraysyin mâ istaqâmû lakum*” dan hadis “*Man qatala nafsan mu`āhadatan bighairi ḥaqqihā lam yajid rāiḥta Al-jannati*” (Al Mustadrak 133).

Dalam Teori Kepemimpinan Demokratis (*Democratic Leadership Theory*) menerangkan pemimpin memberikan kebebasan untuk rakyatnya dan mendorong rakyat untuk ikut serta dalam keputusan serta pemecahan masalah. Dan pada Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*), teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hak-hak secara alami, dengan demikian hak tersebut harus dilindungi dan dijaga oleh pemerintah atau pemimpin. (Diah Atika Pramono, 2016).

Sementara itu, di dalam Islam manusia memiliki hak-hak yang telah ada dari sebelum lahir bahkan sampai meninggal dunia, hadis yang terkait pada kebebasan yaitu; *Tetaplah kalian membela Quraisy selama mereka menegakkan keadilan untuk kalian* (Musnad Ahmad 21354) dan “*Barangsiapa membunuh jiwa mu'ahidah (orang yang telah melakukan perjanjian dengan umat Islam, sehingga jiwa dan agama serta kehormatannya aman) tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium bau surga*” (Al Mustadrak 133).

Dari 2 hadis diatas, Pada hadis pertama, yaitu dengan tidak memaksakan dan memeberikan kebebasan untuk memilih siapa pemimpin meskipun dari berbeda golongan atau kaum. Pada hadis ke dua, menerangkan bahwa kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapat serta membela suatu kaum yang berbeda dari dirinya. Kesimpulannya, bahwa

kebebasan merupakan hal terpenting dalam menegakkan kesejahteraan rakyat dalam tegaknya demokrasi.

4. KESIMPULAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi pemimpin lah yang mengatur kekuasaan untuk kelangsungan rakyat. Prinsip utama dalam demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui perwakilan. Dalam prinsip-prinsip demokrasi memiliki tujuan yang dapat menciptakan kesejahteraan pemerintahan dengan rakyat. Sama hal dengan demokrasi menurut pandangan Islam, yang dimana memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam prespektif Islam, termasuk dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ialah kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang baik seperti; adil, amanah, jujur, dan tanggung jawab. Partisipasi rakyat, kesetaraan dan kebebasan. Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi sangat selaras dengan Islam yang telah diajarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali, 'Amar Ma ' Ruf Nahi Munkar Dalam Masyarakat Muslim', 2009 'Al-Hujarat', 2024 <<https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>>
- Alif, Muhammad, 'Islam Dan Demokrasi: Tinjauan Atas Konsep Syūrā Dalam Alquran', 12.02 (2018)
- Almubarak, Fauzi, 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Istighna*, 1.2 (2018)
- Ayu, I Gusti, and Nyoman Budiasih, 'Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9.1 (2013)
- Bakar, Marina bt Abu, 'Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Khulafa' Ar-Rasyidin', *Adil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Diartikan Dengan Sama Berat, Tidak Berat Sebelah, Dan Tidak Memihak21 Atau Bisa Juga Diartikan Tidak Melebihi Atau Mengurangi Daripada Yang Sewajarnya Serta Berpihak Pada Kebenaran.22 Dalam Ilmu Hadits, Keadilan Dia*
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Islam Kosmopolitan Abdurrahman Wahid', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022)
- Demokrasi, Aktualisasi, and Kehidupan Berbangsa, 'Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', March 2016, 2018

- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023)
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan Jhon Rawls', October, 2017
- Hairiah, Muslimatul, Muhammad Labib, Hasyim Asy, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta, 'Analisis Teori Situasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemimpin', 5.2 (2024)
- Hakiki, Kiki Muhamad, 'Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1.1 (2016)
- Harsoyo, Roni, 'Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M . Bass Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam', 3.2 (2022)
- Hendryadi, 'Situational Leaderhip Model Hersey and Blanchard', *Teorionline Personal Paper*, No. 01/ Fe.01 (2014)
- Hidayat, Rian, 'Berintegrasi Dengan Sifat Amanah Dan Jujur'
- HYRONIMUS ROWA, 'Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia', 2015
- Kasih, Ekawahyu, 'Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34.4 (2018)
- Kennedy, John F, Winston Churchill, Warrant Buffet, and Ciri Perilaku, 'Pemimpin Karismatik'
- Kurniati, Siti Chumaidah, Sudarti, Ahmad hariyadi, Slamet Utomo, 'Gaya Kepemimpinan Demokrasi Dan Visioner', 2023
- Muhaemin, Muhaemin, 'Prinsip Tauhid Dalam Demokrasi Islam (Suatu Analisis Perspektif Teori Kedaulatan)', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2021)
- Mulyana, Aam Rachmat, Ade Sobandi, and Budi Santoso, 'Literatur Review Kepemimpinan Etis', 7.2 (2023), 983–91
- Mutakin, Ali, 'Islam Dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 1.1 (2016)
- Noviati, Cora Elly, 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10.3 (2018)
- Pateman, Carole, 'Participation and Democratic Theory', 1943
- Pramono, Diah Atika, 'Teori Dan Prinsip Hak Asasi Manusia', 2016
- Prasetyo, Bambang, 'Pembubaran Hizbut Tahrir Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Politik', 19.2 (2019)
- Sawor, Lewi, Henoch Budiyanto, Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi, and Teologi

- Lintas, 'Peran Teori Kepemimpinan Melayani Greenleaf Pada Peningkatan Manajemen Karyawan Dalam Budaya Kerja', 4.June (2023) <<https://doi.org/10.55076/didache.v4i2.169>>
- Suryawati, Nany, and Ika Widiastuti, 'Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.143-152.2021>>
- Winbaktianur, Winbaktianur, Universitas Islam, and Negeri Imam, 'Kepemimpinan Otentik Dalam Organisasi', October, 2019 <<https://doi.org/10.15548/alqalb.v10i1.830>>
- Zainuddin, M, '(Telaah Implementasi Demokrasi Di Negara Muslim)', *Ulul Albab*, 4.2 (2022)
- Zebua, Yaterorogo, 'Pemimpinan Yang Memberdayakan: Perspektif Kepemimpinan Kristen', *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.55076/didache.v3i1.50>>
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Aḥmad Muḥammad Syākir. Vol. 1–20. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Tirmīziy, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Daḥḥak al-. *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmīziy)*. Edited by Basysyār 'Awad Ma'rūf. Vol. 1–6. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996.
- Dārimiy, Abū Muḥammad 'Abdī ibn 'Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn 'Abd al-Ṣamad al-. *Al-Musnad Al-Jāmi' Al-Ma'rūf Bi Sunan Al-Dārimiy*. Edited by Ḥusain Salīm Asad al-Dārāniy. Vol. 1–4. Dār al-Mugnī, 2000.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib al-Arna'ūṭ and 'Ādil Mursyid. Vol. 1–50. Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Ḥākim, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-. *Al-Mustadrak 'alā Al-Ṣaḥīḥain*. Edited by Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā. Vol. 1–4. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Vol. 1–5. Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy, 1955.
- Ibn Anas, Mālik. *Al-Muwatta'*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy, 1985.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad. *Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Edited by Syu'aib al-Arna'ūṭ. Vol. 1–18. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988.
- Bukhāriy, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 1–9. Dār Tauq al-Najāt, 1422.